

1 Juni 1945
part 3

noeroet aliran zaman? Ada segoet golongan yang terbesar yang mengatakan, bahwa itoe tidak diperbolehkan tetapi ada lagi golongan yang mengatakan: Ikan disponsikan dengan zaman baroe. Sempurnaja sadja seorang ahli agama terkenal, jaitoe Kepala dari sekolah tinggi "Al-Ashar" di Kairo, Mohamed Abdu, yang termasuk aliran zaman - dan ia mempunyai moerid disini djoega - mengatakan: "Memang hokoeom sjariah bisa direbah dengan tjara'Idjma", jaitoe permaesjajaran, asal sadja tidak bertentangan dengan Qur'an dan dengan Hadith". Ada lagi yang mempunyai pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdul Basir, yang mengatakan, bahwa agama terpisah daripada hokoeom yang mempunyai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hokoeom negara, sebagai seseorang dengan aliran zaman modern, yang sudahlah perhatian dari negara-negara yang terroet berhubung dengan dunia internasional itoe. Djadi sendirinja kita disini mendirikan negara Islam, pertentangan pendirian itoe akan timbul djoega dimasjarekat kita dan barangkali Badan Penjelidik inipun akan seoesah memperbincangkan soal itoe. Akan tetapi, team-team yang terhorat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti, tidak akan mendirikan negara persatoean. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatoean diri dengan golongan yang terbesar, jaitoe golongan Islam. Djikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentoe akan timbul soal-soal "minderheden", soal golongan agama yang ketjil-ketjil, golongan agama Kristen dll. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itoe, akan tetapi golongan-golongan agama ketjil itoe tentoe tidak bisa mempersatoean dirinja dengan negara. Oleh karena itoe tjita-tjita Negara Islam itoe tidak seoesai dengan tjita-tjita negara persatoean yang telah di idan-idankan oleh kita saweemja dan djoega yang telah diandjoeikan oleh Pemerintah Balatantera. Oleh karena itoe saja mengandjoeikan dan saja mepakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang berastoe dalam arti, totaliter seperti yang saja oerikan tadi, jaitoe negara yang tidak akan mempersatoean diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengidahkan dan menghormati kristenewann dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang ketjil. Dengan sendirinja dalam nagari nasional yang berastoe itoe, oeroesan agama akan terpisah dari oeroesan negara dan dengan sendirinja dalam negara nasional yang berastoe itoe oeroesan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang berangkoetan. Dan dengan sendirinja dalam negara sedemikian seseorang akan werdaa memeluk agama yang dikehendakja. Baik golongan agama yang terbesar, maupun golongan yang terketjil, tentoe akan merasa berastoe dengan negara (dalam bahasa asing "zal sich thuis voelen" dalam nagaranja).

Madirin yang terhorat!

Negara Nasional yang berastoe itoe tidak berarti, bahwa negara itoe akan beradikat "religieus". Itoe bukan. Negara nasional yang berastoe itoe akan memelihara beadi pekerti kemanusiaan yang loehoe, akan memegang tegoh tjita-tjita moral rah-

jat yang loehoe. Maka negara sedikian itoe - dan hendakja negara Indonesia djoega - menjadi dasar moral yang loehoe, yang diandjoeikan djoega oleh agama Islam.

Sebagai tjontoh, dalam negara Indonesia itoe hendakja diandjoeikan, sebagai para warga nagara tjita kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri dan sopka beribakti kepada tanah air; sebagai mantjintai dan berbakti kepada hamdjin dan kepada manusa; sebagai ikhlas kepada Rehban, sebagai tiap-tiap waktu ingat kepada Rehban. Itoe saweemja harus diandjoeikan, harus dipatri sebagai dasar moral dari negara nasional yang berastoe itoe. Dan saja yakin, bahwa dasar-dasar itoe diandjoeikan oleh agama Islam.

Sekarang saja akan membicarakan soal yang berhubungan dengan bentuk sosoemman negara. Apakah negara persatoean (ambidestaat) atau negara serikat (bondstaat) atau negara persekotoean (federatie)?

Dengan sendirinja negara sejara federatie kita tolek, karena dengan mengadakan federatie, itoe bekoemja mendirikan gatoe negara, tetapi beberapa negara. Sedang kita hendak mendirikan gatoe negara. Djadi tinggal membicarakan ambidestaat atau bondstaat. Djika benar, bahwa bondstaat itoe djoega gatoe negara beika, maka lebih baik kita tidak memakai etiket "ambidestaat" atau "bondstaat", oleh karena perkatana-perkatana itoe mungkin menimbulkan salah paham. Sebagai telah diorekan oleh nagara yang terhorat team Moh. Hatta, maka dalam negara itoe soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung kepada masa, tempat dan soal yang bersangkutan. Maka dalam negara Indonesia yang berdasar propertion negara integralistik itoe, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai kristenewann sendiri, akan mempunyai tempat dan kedoelekann sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seloerannja. Soal pemerintahan apakah yang akan dioreas oleh pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintahan daerah, baik daerah besar, maupun daerah ketjil, itoe saweemja akan tergantung dari "realistigheid" berhubung dengan waktoma, tempatnja dan djoega selinja.

Misalnja soal ini, pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik dioreas oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itoe, pada masa itoe dan tempat itoe lebih baik dioreas oleh pemerintah pusat. Djadi dalam negara totaliter atau integralistik, nagara akan ingat kepada segala keadaan, hokoeom nagara akan memperhatikan segala kristenewann dari golongan-golongan yang berantjan-matjan atawa dituntut air kita itoe. Dengan sendirinja dalam negara yang terdiri atas posion-posion yang bagitoe besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang bentuk sosoemman nagara.

Sekarang tentang soal: republik atau monarhi?

Team-team yang terhorat! Menaroet hemat saja soal republik atau monarhi itoe tidak mengenai dasar sosoemman pemerintahan. Yang penting ialah, hendakja kepada nagara, bahkan dalam bentuk pemerintahan mempunyai sifat hamdjin antara dan gatoe seloerannja.

Kepala nagara harus anggoep mantjintai rakyat seloerannja. Kepala nagara harus

mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah kepala negara itoe akan diberi kekuasaan sebagai Raja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai "Mahar", itoe semuanya tidak mengenai dasar seseorang pemerintahan. Baik raja atau presiden atau Mahar, atau kepala negara yang bergelar ini atau itoe, misalnya bergelar "Sri Paduka yang Ebertuan Besar" atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sedjati. Ia harus berastoe jiwa dengan rakyat seleroehnja.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak toeroentoeroen, atau hanya oentoek waktoe yang tertentu, itoeak hanya mengenai oentoek seseorang pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Tjeranja mengangkat pemimpin negara itoe hendaknya djanganlah ditoeoet tjara pilihan moneroet sistim demokrasi barat, oleh karena pilihan setjara sistim demokrasi barat itoe berdasar atas paham perseroengn.

Toean-toean sekalian hendaknya inajaf kepada konsekwenai dari pendirian menolak dasar perseroengn itoe. Menolak dasar individualisme berarti menolak djoga sistim parlementarisme, menolak sistim demokrasi barat, menolak sistim yang menjangkau manusia satoe sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganja.

Oentoek mendjadin seapaja pimpinan negara teroetama Kepala Negara teroes moneroes berastoe jiwa dengan rakyat, dalam seseorang pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistim Badan permoesjawaratan. Kepala Negara akan teroes bergoealan dengan Badan permoesjawaratan seapaja senantiasa mengetahui dan merasakan rasa kendil rakjat dan tjita-tjita rakjat. Bagaimana akan bentoeknja Badan permoesjawaratan itoe, ialah satoe hal yang harus kita selidiki, akan tetapi hendakja djangan menakai sistim individualisme, toekan sadja Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerahpoen sampai kepala daerah yang kotjil-kotjil, misalnya kepala desa, harus mampoenjai sifat pemimpin rakjat yang sedjati. Memang dalam masyarakat desa yang asli, kepala desa mampoenjai sifat pemimpin rakjat yang sedjati. Kepala adat atau kepala desa menjanggurakan kendil rakjat, senantiasa memberi Gestaltung kepada koinsjafan kendil rakjat. Djika Kepala Negara Indonesia akan bersifat demikian, maka Kepala Negara itoe akan mampoenjai sifat Maloe Adil, seperti yang di iden-idamkan oleh seleroeh rakjat Indonesia.

Sekarang tentang perhoeboengan antara negara dan perekonomian. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatoean, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim "socialisme negara" (staatsocialisme). Peroesahan-peroesahan yang penting akan dioeroes oleh negara-sendiri, akan tetapi pada hakikatja negara yang akan menantoekan djawa dan djawa apa dan peroesahan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada seseorang badan hoekoen privit atau kepada seseorang, itoe semua tergantung dari pada kepentingan negara, kepentingan rakjat seleroehnja. Dalam negara Indonesia Ra-

rae, dengan sendirinja moneroet keadaan sekarang, peroesahan-peroesahan sebagai laoe-litoe, electriciteit, peroesahan alat rumah harus dioeroes oleh negara sendiri. Begitoepoen tentang hal lain. Pada hakikatja negara yang mampoenjai tanah seleroehnja.

Tambang-tambang yang penting oentoek negara akan dioeroes oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinja tanah pertanian menjadi tanah negara dari kaum tani dan negara harus mendjaga seapaja tanah pertanian itoe tetap dipegang oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekoleaergaan djoga oleh karena kekoleaergaan itoe sifat masyarakat timoe, yang harus kita palihara sebaik-baiknya. Sistim tolong-memolong, sistim kooperasi hendakja dipakai sebagai salah satoe dasar ekonomi negara Indonesia.

Dasar totaliter dari Negara kebangsaan yang berastoe itoe mampoenjai akibat-akibat poela dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepandjangan, djikalau saja sembitjarkan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itoe.

Sekian sadja Paduka Toean Ketoes, tentang dasar-dasar yang hendakja dipakai oentoek mendirikan negara Indonesia Merdeka. Atas dasar pengertian negara sebagai persatoean bangsa Indonesia yang teroesoan atas sistim hoekoen yang bersifat integralistik tadi, dimana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penjelenggara koinsjafan kendil rakjat seleroehnja, maka kita akan dapat melaksanakan negara Indonesia yang berastoe dan adil. Seperti sudah teroesat dalam Pantja Sjaroe, pasal yang berbentoek: Kita mendirikan negara Indonesia, yang (makoeer, berastoe, beradil) adil. Maka Negara hanya bisa adil, djikalau negara itoe menjanggurakan rasa kendil rakjat dan upoentoek rakjat kepada tjita-tjita yang loehoe, moneroet aliran djawa. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebangsaan Indonesia yang asli, dengan sendirinja akan bersifat negara Asia Timur Raya. Dan negara Indonesia yang terbentuk atas aliran pikiran persatoean yang saja ceralan tadi, juga akan dapat menjalankan Charmanja (koinsjafanja) dengan semestinja sebagai anggota dari pada kekoleaergaan Asia Timur Raya.

Terima kasih !